

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Purworejo Tahun 2018 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018. Program dan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2018 diarahkan kepada penyelesaian pencapaian tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah disusun dalam suatu tahapan tertentu untuk menjamin adanya konsistensi dan keberlanjutan proses pembangunan serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan tahun berjalan dengan RKPD, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Prioritas pembangunan tahunan disusun berdasarkan kriteria :

- a. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan;
- b. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- c. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;
- d. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan RKT merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan

Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKT mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah satu tahun;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

2 Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pembangunan. Bersama-sama dengan perencanaan menjadi komponen dalam siklus pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi adalah merupakan review atas segala hal yang mengarah pada sebuah keberhasilan maupun kegagalan atas upaya yang telah dikerjakan. Menjadi sangat esensial keberadaannya seandainya dapat menjadi titik tolak pelaksanaan pembangunan periode berikutnya.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Purworejo menghasilkan berbagai pencapaian. Pokok-pokok hasil capaian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purworejo disajikan dalam 2 kelompok besar yaitu Kondisi Umum Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan.

1. Kondisi Umum Daerah

1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1. Letak, luas dan batas wilayah

Secara geografis, Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara $109^{\circ} 47' 28''$ - $110^{\circ} 8' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 32' - 7^{\circ} 54''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah $1.034,82 \text{ km}^2$ yang terdiri dari $\pm 2/5$ daerah dataran dan $3/5$ daerah pegunungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Wonosobo dan Magelang
Sebelah timur : Kabupaten Kulon Progo, Propinsi
DIY
Sebelah : Samudra Indonesia
selatan
Sebelah barat : Kabupaten Kebumen

2. Kondisi Topografi

Kondisi kemiringan lereng atau lereng Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu:

- a. Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo,
- b. Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen,
- c. Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo,
- d. Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh.

Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 meter sampai dengan 1.064 meter di atas permukaan laut.

Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.
- b. Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1064 meter di atas permukaan air laut.

3. Kondisi Klimatologis

Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam maupun dalam potensi bencana alam. Kabupaten Purworejo beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata suhu

udara di Purworejo antara 19–28°C dengan curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 620 mm/tahun hingga 3.720 mm/tahun.

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengakibatkan penjenahan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (*trigger factor*) terjadinya bencana yaitu banjir dan tanah/lahan longsor.

4. Kondisi Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Purworejo dapat dirinci menjadi bahasan mengenai lithologi/batuan, stratigrafi dan struktur geologi. Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa fenomena alam khususnya kebencanaan seperti longsor, banjir maupun kekeringan. Proporsi litologi batuan Kabupaten Purworejo berupa batuan sedimen dan perselingan batuan gunung api sebesar 60,1% terdapat di bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo pada daerah dengan topografi tinggi dan 39,9% aluvium tersebar pada daerah dengan topografi rendah di bagian selatan dan barat Kabupaten Purworejo. Susunan batuan/stratigrafi yang menyusun wilayah Kabupaten Purworejo mengikuti tata stratigrafi pada Pegunungan Serayu Utara yang berada di bagian utara dan Pegunungan Menoreh yang berada di bagian timur. Kabupaten Purworejo sendiri memiliki empat bentuk lahan asal proses, meliputi bentuk lahan asal proses struktural, bentuk lahan asal proses fluvial, bentuk lahan asal proses marin dan bentuk lahan asal proses denudasional.

5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan sumber daya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumber daya alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.

Kabupaten Purworejo memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Di Kabupaten ini terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara di Samudera Indonesia. Sungai-sungai ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan dan Wawar. Hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo.

6. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Purworejo dibagi menjadi dua kategori yaitu lahan kering seluas 72,854.80 Ha atau 70,40 % dan tanah sawah seluas 30,626.97 Ha atau 29,60%. Lahan kering terdiri dari 10,116.50 Ha berupa tanah bangunan dan halaman sekitarnya, 51,598.14 Ha berupa tegal/kebun /ladang/huma, 6,857.88 Ha berupa hutan negara, dan sisanya berupa padang rumput, tambak, tanah lainnya. Luas sawah beririgasi adalah 27,677.14 Ha, sedangkan sawah tadah hujan seluas 2949.83 Ha.

Dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo kurang terkendali. Sebagian besar perubahan yang terjadi berupa alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian seperti untuk perumahan dan permukiman.

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Penetapan kawasan strategis pada wilayah Kabupaten Purworejo terdiri dari tiga sudut pandang

1. Dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi kawasan perkotaan Purworejo – Kutoarjo yang dapat dikembangkan menjadi kawasan Aglomerasi – Kutoarjo berbasis jasa, perdagangan dan industri
2. Dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan situs Prasasti Kayu Arahiwang di Desa Boro Wetan Kecamatan Banyuurip, kawasan alun-alun Purworejo dan sekitarnya, dan kawasan petilasan WR. Supratman di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing.
3. Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan DAS, kawasan pegunungan Menoreh, kawasan pegunungan Serayu selatan, kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan TPA sampah gunung tumpeng di Desa Jetis Kecamatan Loano

8. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Di Wilayah Kabupaten Purworejo terdapat 4 (empat) kawasan rawan bencana alam, yaitu kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang dan kawasan rawan bencana kekeringan.

9. Demografi

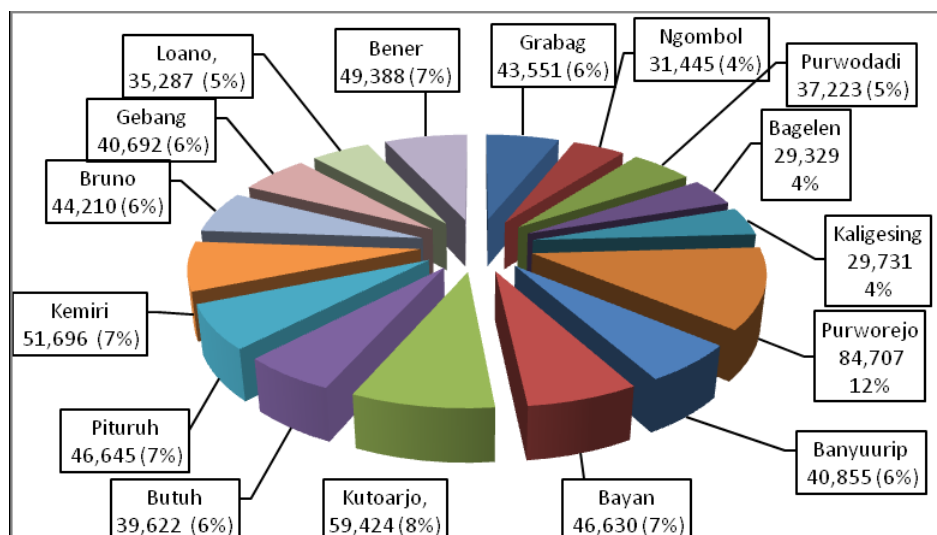
a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo menurut hasil Sensus Penduduk pada bulan Mei 2010 adalah 694.404 jiwa. Pada akhir tahun 2015 adalah 710.435 jiwa. Sedangkan hasil proyeksi 2010-2020, penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2016 sebesar 712.686 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 351.481 jiwa, penduduk perempuan 361.205 jiwa (sumber BPS Kabupaten Purworejo).

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo dari tahun 2013-2015 sebesar 0,3954%. Pertumbuhan penduduk Kecamatan yang di atas rata-rata Kabupaten Purworejo adalah Kecamatan Grabag, Purwodadi, Bagelen, Purworejo, Banyuurip, Bayan, Gebang. (*sumber : Purworejo Dalam Angka, BPS, 2016*).

Pekerjaan menurut lapangan usaha penduduk Kabupaten Purworejo umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagian besar didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (25,99%), kemudian diikuti sektor pertambangan dan penggalian (0,82%), sektor industri pengolahan (18,36%), pengadaan listrik dan gas (0,07%), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,06%), konstruksi (8,44%), perdagangan besar dan eceran (12,42%), transportasi dan pergudangan (5,41%), penyediaan akomodasi dan makan minum (2,05%), informasi dan komunikasi (4,51%), jasa keuangan dan asuransi (3,53%), *real estate* (2,02%), jasa perusahaan (0,27%), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (4,15%), jasa pendidikan (8,19%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1,56%) dan jasa lainnya (2,14%). (*Sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2016*).

Adapun Prosentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2015 sebagaimana tersaji pada gambar berikut.



Prosentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2015

Dilihat dari persebarannya, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 12 % dan 8,36% dari jumlah penduduk Kabupaten Purworejo.

b. Usia

Penduduk Purworejo berusia antara 15–64 Tahun sebesar 65,06%. Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2015 adalah 53,70%. Artinya 100 penduduk usia produktif (15-64) rata-rata menanggung beban 54 penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 keatas).

Perkembangan Besarnya Rasio Beban Ketergantungan

Kelompok Umur	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0 sampai dengan 14	177.021	177.269	173.164	172.112	170.195	168.331
15 sampai dengan 64	444.654	445.226	457.856	457.369	460.005	462.215
65 keatas	73.802	73.905	77.563	76.002	77.838	79.889
Rasio Beban Ketergantungan (%)	56,42	56,41	54,74	54,25	53,92	53,70

Sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka berbagai tahun terbitan (diolah)

Untuk Kabupaten Purworejo tergolong piramida penduduk muda yang berarti angka kelahiran masih lebih besar daripada angka kematian.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan di bagi menurut usia, tua dan muda:

- 1) Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 – 64 tahun.
- 2) Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu Negara atau wilayah, apakah tergolong Negara atau wilayah maju atau Negara atau wilayah yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sedangkan persentase rasio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk

membayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berkaitan dengan angka beban ketergantungan Kabupaten Purworejo pada kisaran angka 50-55, menunjukkan kondisi yang hampir seimbang yang berarti jumlah penduduk produktif masih menanggung penduduk non produktif sebesar \pm 5%.

1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

PDRB dan Perkembangannya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang di dalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu / satu tahun. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung yang menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yg dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar, yaitu dalam periode tahun sampai dengan tahun 2015 ini menggunakan tahun dasar tahun 2010

Dalam kurun waktu tahun 2011-2015, PDRB Kabupaten Purworejo atas harga berlaku adalah Rp 9.585.146.260.000,- di tahun 2011, meningkat menjadi Rp 10.471.685.790.000,- di tahun 2012, meningkat menjadi Rp 11.462.756.670.000,- di tahun 2013, tahun 2014 mencapai Rp.12.660.418.960.000,- meningkat menjadi Rp 13.837.883.620.000,- di tahun 2015. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 8.993.814.300.000,- di tahun 2011, Rp 9.406.242.930.000,- di tahun 2012, Rp 9.870.969.950.000,- di tahun 2013, menjadi Rp 10.313.937.790.000,- di tahun 2014 dan menjadi Rp 10.841.660.980.000,- di tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo pada tahun 2011 s.d. tahun 2012 adalah dari 5,01%, meningkat menjadi 5,02% dan meningkat lagi menjadi 5,04% pada tahun 2013, tetapi menurun menjadi 4,99% pada tahun 2014, meningkat lagi menjadi 5,12% pada tahun 2015. Kondisi di tahun 2015 tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 5,42%. Demikian juga jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,04%, Kabupaten Purworejo sudah berada di atas rata-rata nasional.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

2.1 Evaluasi pencapaian prioritas pelaksanaan pembangunan.

Evaluasi pembangunan adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi pembangunan dilaksanakan secara sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis data informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.

2.2 Evaluasi Atas Pelaksanaan Pembangunan Dalam Dimensi Kewilayahan.

Perkembangan pembangunan suatu daerah pada dasarnya adalah merupakan akumulasi dari perkembangan pembangunan wilayah-wilayah yang menjadi cakupannya. Perkembangan pembangunan Kabupaten Purworejo merupakan akumulasi dari perkembangan pembangunan 16 Kecamatan dan 494 desa yang ada di Purworejo. Dengan demikian perkembangan pembangunan sebuah Kabupaten salah satu faktor penentunya adalah sejauhmana perkembangan wilayah-wilayah cakupannya, seberapa besar kesenjangan antar wilayah yang ada.

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya konsentrasi aktivitas ekonomi secara parsial dan seringkali memunculkan kondisi ketimpangan antar daerah.

2.2.1 Ketimpangan Antar Wilayah

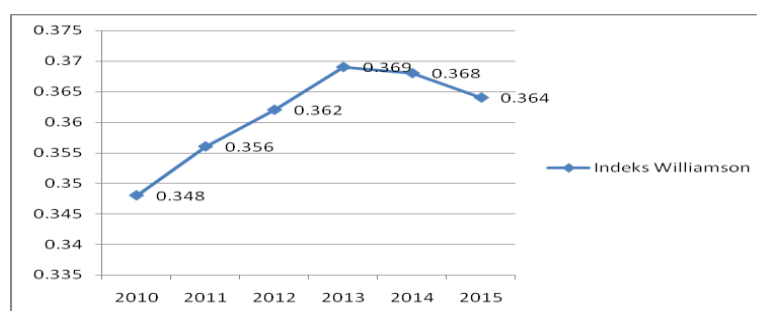
Ketimpangan antar wilayah dapat ditunjukkan dengan besaran Indeks Williamson. Angka indeks ini menunjukkan ketimpangan antar wilayah secara umum dengan pendekatan ekonomi. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik, suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar wilayah. Upaya-upaya pembangunan melalui intervensi program dan kegiatan terhadap suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus memperkecil kesenjangan antar wilayah. Dengan menggunakan data PDRB per kapita atas dasar harga (ADH) konstan 2000 masing-masing kecamatan dapat dihitung Indeks Williamson.

PDRB per kapita ADH Konstan Tahun 2000 dirinci menurut kecamatan Tahun 2012-2015 (dalam ribuan rupiah)

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Grabag	3.849,60	4.000,06	4.209,14	4.403,42
2	Ngombol	4.693,78	4.870,40	5.024,87	5.218,85
3	Purwodadi	4.868,41	5.087,30	5.305,81	5.552,47
4	Bagelen	4.195,71	4.360,31	4.557,58	4.777,09
5	Kaligesing	4.296,38	4.507,49	4.713,53	4.934,12
6	Purworejo	8.251,32	8.712,04	9.228,61	9.746,21
7	Banyuurip	6.223,69	6.546,09	6.855,40	7.198,80
8	B a y a n	3.745,27	3.932,84	4.115,42	4.319,34
9	Kutoarjo	6.631,57	6.997,50	7.406,89	7.818,68
10	B u t u h	4.799,70	4.978,60	5.142,40	5.388,31
11	Pituruh	4.670,28	4.837,75	4.988,68	5.226,17
12	Kemiri	3.809,32	3.946,73	4.075,83	4.233,24
13	B r u n o	2.571,15	2.649,01	2.754,77	2.870,54
14	Gebang	3.304,21	3.430,70	3.541,15	3.690,11
15	L o a n o	3.078,01	3.192,47	3.302,99	3.424,88
16	B e n e r	2.692,45	2.806,07	2.928,10	3.060,81
PDRB Kabupaten		4.735,56	4.952,07	5.180,87	5.433,67

(Sumber data: PDRB Kecamatan, BPS tahun terbit 2016)

Perkembangan tingkat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu terakhir ini sebagai berikut:



Perkembangan Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) di Kab.Purworejo Tahun 2010 s.d 2015

Pada gambar tersebut tampak bahwa ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Purworejo memiliki kecenderungan meningkat terus sampai dengan tahun 2013, namun kemudian turun sedikit pada tahun 2014 menjadi 0,368, dan 0,364 pada tahun 2015. Semakin kecil angka Indeks Williamson (mendekati nol) menunjukkan tingkat ketimpangan yang makin kecil atau dengan kata lain tingkat pembangunan antar wilayah makin merata. Untuk menentukan apakah kesenjangan ada pada kesenjangan level rendah, sedang, atau tinggi. Berikut ini adalah kriterianya:

- a. Kesenjangan level rendah, jika $IW < 0,35$
- b. Kesenjangan level sedang, jika $0,35 \leq IW \leq 0,5$
- c. Kesenjangan level tinggi, jika $IW > 0,5$

Berdasarkan kriteria tersebut, maka Kabupaten Purworejo tergolong Kesenjangan pada level sedang.

Pertumbuhan Ekonomi ADH Konstan Tahun 2000 Dirinci
Menurut Kecamatan Tahun 2013-2015

No	Kecamatan	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Grabag	4,32	5,61	4,97
2	Ngombol	4,17	3,54	4,22
3	Purwodadi	4,91	4,68	5,00
4	Bagelen	4,34	4,90	5,17
5	Kaligesing	4,91	4,95	5,03
6	Purworejo	6,01	6,31	5,97
7	Banyuurip	5,60	5,11	5,37
8	Bayan	5,43	5,02	5,32
9	Kutoarjo	5,93	6,23	5,91
10	Butuh	4,14	3,66	5,14
11	Pituruh	3,99	3,49	5,11
12	Kemiri	4,01	3,64	4,21
13	Bruno	3,44	4,37	4,56
14	Gebang	4,24	3,59	4,56
15	Loano	4,13	3,84	4,04
16	Bener	4,63	4,72	4,88

(Sumber data: PDRB Kecamatan, BPS tahun terbit 2016)

Pendapatan per kapita (Y) Pertumbuhan Ekonomi (R)	Y<	Y>
R <	Maju Dengan Pertumbuhan Cepat (Purworejo, Banyuurip, Kutoarjo)	Berkembang Cepat (Grabag, Bayan)
R >	Maju Tapi Tertekan (Purwodadi)	Kurang Berkembang (Ngombol, Bagelen, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, Bener)

(Sumber data: PDRB Kecamatan, BPS tahun terbit 2016 (diolah))

Tipologi Wilayah Kabupaten Purworejo

Gambar 2.9. tersebut diatas menunjukkan tipologi wilayah-wilayah di Kabupaten Purworejo yang dikelompokkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya, dengan titik tolak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita rata-rata di tingkat Kabupaten.

Terdapat 4 kelompok yaitu:

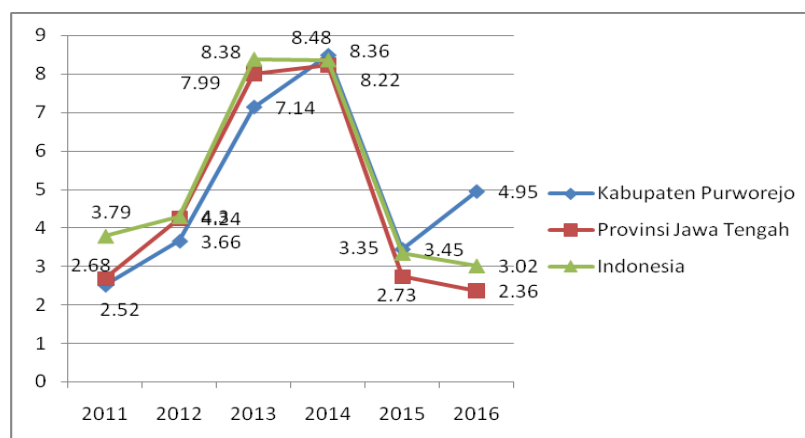
- 1) Maju dengan pertumbuhan cepat, yaitu pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonominya tinggi (diatas rata-rata kabupaten). Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Purworejo, Banyuurip dan Kutoarjo)
- 2) Berkembang cepat, yaitu pendapatan perkapita rendah (dibawah rata-rata kabupaten, namun pertumbuhan ekonominya tinggi (diatas rata-rata kabupaten).
Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Grabag dan Bayan
- 3) Maju Tapi Tertekan, yaitu pendapatan perkapita tinggi (diatas rata-rata kabupaten) namun pertumbuhan ekonominya rendah (dibawah rata-rata kabupaten)
Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Purwodadi
- 4) Kurang Berkembang, yaitu pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi kedua-duanya rendah (dibawah rata-rata Kabupaten).
Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Ngombol, Bagelen, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, Bener.

Inflasi

Kondisi perekonomian daerah tidak bisa lepas dari pengaruh inflasi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, terutama pengaruh kebijakan makro oleh pemerintah secara nasional. Inflasi menunjukkan tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu wilayah. Dengan mencermati tingkat inflasi yang terjadi di suatu wilayah tertentu dari waktu ke waktu akan diketahui tingkat perkembangan harga dan kestabilan perekonomian di wilayah tersebut.

Inflasi Kabupaten Purworejo sepanjang tahun 2016 mencapai 4,95%, tahun 2015 cukup baik yaitu mencapai 3,45%, jauh lebih rendah dari kondisi tahun 2014 yang sebesar 8,48%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat perubahan harga di Purworejo pada tahun 2016 lebih stabil apabila

dibandingkan dengan tahun 2014. Perkembangan inflasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tampak dalam gambar 2.10.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) & Bappeda Purworejo, 2011-2016

Laju Inflasi Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2016

Inflasi pada tahun 2016 secara umum dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas dari tujuh kelompok barang dan jasa, yaitu kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar, Sandang, Kesehatan, Pendidikan, Rekreasi & Olahraga, dan kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Distribusi inflasi per kelompok barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Inflasi Kabupaten Purworejo Menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2011-2016

No.	Kelompok Barang dan Jasa	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bahan Makanan	3,11	3,52	13,80	9,49	3,34	6,80
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,53	8,09	2,94	8,52	7,30	7,47
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar	2,48	2,34	5,17	6,81	6,99	5,19
4	Sandang	7,03	1,93	2,25	4,35	0,94	0,78
5	Kesehatan	2,03	3,99	1,93	2,92	1,50	1,50
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	2,15	1,59	0,64	0,00	2,15	2,15
7	Transport, Komunikasi dan Jasa keuangan	0,51	1,13	11,37	16,18	2,94	0,02
Inflasi Umum		2,52	3,66	7,14	8,48	3,45	4,95

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Purworejo dari beberapa tahun terbitan.

Secara detil mengenai Inflasi Kabupaten Purworejo menurut bulan dan kelompok barang dan jasa tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Inflasi Kabupaten Purworejo Menurut Bulan dan Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2016

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
Januari	-2,57	-0,16	2,54	0,16	0,00	0,00	-4,23
Februari	-3,19	1,78	2,46	0,20	0,28	0,00	-4,23
Maret	-3,61	2,36	4,41	0,33	0,28	0,00	-4,23
April	-3,58	3,30	4,31	0,05	0,28	0,00	-4,23
M e i	-5,00	4,45	5,96	-0,02	0,28	0,00	-4,23
J u n i	-3,59	6,53	5,88	-0,23	1,40	0,00	-4,23
J u l i	0,93	6,05	6,04	0,26	1,40	0,47	-1,29
Agustus	1,35	5,89	6,43	0,75	1,50	-2,15	-2,63
September	1,53	5,89	6,43	0,87	1,50	-2,15	-2,63
Oktober	-0,52	6,85	6,43	0,91	1,50	-2,15	-2,63
November	-0,17	6,85	6,99	0,93	1,50	-2,15	-2,94
Desember	3,34	7,30	6,99	0,94	1,50	-2,15	-2,94

Sumber: Indek Harga Konsumen dan Inflasi Kota Purworejo Tahun 2016

Perkembangan laju inflasi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitar, Empat Kota Survey Biaya Hidup (SBH), Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitar, Empat Kota Survey Biaya Hidup (SBH), Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2016

No.	Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kab. Purworejo	2,52	3,66	7,14	8,48	3,45	4,95
2.	Empat Kota SBH						
	Purwokerto	3,40	4,73	8,50	7,09	2,52	2,42
	Surakarta	1,93	2,87	8,32	8,01	2,56	2,15
	Semarang	2,87	4,85	8,19	8,53	2,56	2,32
	Tegal	2,58	3,09	5,80	7,40	3,95	2,71
3.	Provinsi Jawa Tengah	2,68	4,24	7,99	8,22	2,73	2,36
4.	Nasional	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Purworejo dari beberapa tahun terbitan.

2.2.2. Upaya Pengembangan Wilayah

Pembangunan wilayah telah dilakukan pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah dan hibah dari pemerintah daerah langsung kepada masyarakat.

Secara umum alokasi pada beberapa wilayah tampak relatif lebih besar dari wilayah lain. Pada beberapa skema bantuan memang tidak dapat didistribusikan merata untuk semua wilayah namun disesuaikan dengan jumlah kelompok sasaran yang ada di masing-masing wilayah. Misal untuk Dana Alokasi Untuk Desa didistribusikan sesuai dengan jumlah desa yang ada dalam suatu wilayah. Distribusi bantuan kemasyarakatan, sudah relatif terdistribusi ke 16 wilayah, namun demikian tetap ada wilayah yang alokasinya relatif sangat kecil dibanding wilayah lainnya. Yang relatif lebih besar pada satu wilayah perlu untuk dioptimalkan lagi dari sisi pemerataannya pada periode yang akan datang. Tidak hanya mempertimbangkan proposal yang masuk namun secara proaktif perlu disusun pola alokasi yang lebih merata ke semua wilayah.

Kinerja pelaksanaan kegiatan di kecamatan selama tahun 2017 secara umum dari sisi kuantitas (% realisasi output) cukup baik, namun dari sisi kualitas terdapat beberapa kegiatan yang kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Beberapa upaya lain dalam hal peningkatan kapasitas wilayah, terdapat dalam program dan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh beberapa satuan kerja perangkat daerah. Meliputi peningkatan sarana prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan kelautan maupun perindustrian dan perdagangan.

BAB II

VISI – MISI – TUJUAN – ARAH

I. VISI DAN MISI KABUPATEN PURWOREJO

A. VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta proaktif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Instansi pemerintah.

Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan, dan ekonomi kerakyatan

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan berhasil baik. Dengan pernyataan visi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Misi Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga.
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Untuk mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan dan ekonomi kerakyatan sebagaimana misi ke-2 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 mengandung makna perlunya untuk meningkatkan daya saing di sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Untuk melaksanakan misi ke-2 tersebut diperlukan arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat sesuai dengan perkembangan keadaan perekonomian Kabupaten Purworejo melihat masa lalu, masa kini dan esok melalui serangkaian proyeksi yang tepat.

2. Arah kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu :

- 1) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi atas sumber-sumber pendapatan yang masuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi untuk optimalisasi atas sumber-sumber pendapatan yang masuk dalam kelompok Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan aset-aset daerah.

Kebijakan terkait dengan optimalisasi PAD ditindaklanjuti dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Merevisi peraturan daerah terkait pendapatan daerah sesuai perkembangan yang terjadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
- 2) Menyusun peraturan daerah yang merupakan sumber PAD baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Membuat target peningkatan PAD dengan mempertimbangkan data realisasi tahun sebelumnya, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi pencapaian masing-masing;
- 4) Mengoptimalkan kinerja penerimaan dari masing-masing SKPD penghasil PAD;
- 5) Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 6) Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan pemberian hadiah;
- 7) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- 8) Meningkatkan manajemen Badan Usaha Milik Daerah agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga memberikan kontribusi pada PAD;

Meningkatkan pendayagunaan aset daerah termasuk kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga mampu mendukung peningkatan

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana pembangunan secara keseluruhan adalah merupakan sinergitas rencana antara rencana pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan kapasitas serta tingkat kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara umum strategi pembangunan nasional menggariskan hal-hal sebagai berikut :

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.
 - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan;
 - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif.
 - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan yaitu sector Kedaulatan pangan, Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, Kemaritiman dan kelautan, serta Pariwisata dan industri.
 - c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil

- kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah,
3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain :Kepastian dan penegakan hukum;Keamanan dan ketertiban; Politik dan demokrasi; dan Tetakelola dan reformasi birokrasi.
 4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Sasaran Prioritas pembangunan Daerah Tahun 2018

Sasaran prioritas pembangunan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- b. Peningkatan kemandirian desa
- c. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi.
- d. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
- e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- f. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olah raga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
- g. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- h. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana
- i. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan sebuah penunjuk arah sekaligus alat kendali penyelenggaraan pemerintahan bagi masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Dengan telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih terarah dan terukur (akuntabel) kualitas dan kuantitasnya. Perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan ini nantinya akan diukur dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat akhir tahun anggaran.

Rencana kinerja tahunan daerah Kabupaten Purworejo tahun 2018 telah disusun dengan seoptimal mungkin melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah daerah, agregasi aspirasi berbagai lapisan masyarakat serta memfokuskan program dan kegiatan

Prioritas dalam implementasinya tidak selalu berupa peningkatan alokasi dana tetapi dapat pula berupa penyempurnaan/perbaikan design pelaksanaan kegiatan yaitu design yang dapat memaksa pelaksanaan kegiatan terarah menjadi lebih efektif yaitu mengena pada sasaran atau tujuan yang diharapkan. Upaya ini akan optimal apabila menjadi titik tolak dalam tahap perencanaan berikutnya yaitu perencanaan anggaran dan teknis kegiatan. Secara lebih detail, matrik sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2018 adalah sebagaimana terlampir.

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN, SE, MM.

RENCANA KINERJA TAHUNAN DAERAH

KABUPATEN : PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	4,64 %
		Meningkatnya PDRB sektor industri	5,85 %
		Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	5,82 %
		Meningkatnya nilai investasi	2 %
2	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Meningkatnya semangat kehidupan beragama	100 %
		Meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan daerah	100 %
		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	13.62
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	74.21
3	Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran	3.8 %
		Menurunnya kesenjangan antar wilayah	0,355 %
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	100 %
4	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik	100 %
		Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi daerah	100 %

BUPATI PURWOREJO,

Cap ttd

AGUS BASTIAN, SE, MM

